BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

5.1 Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN Tahun 2012-2023

5.1.1 Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi

Indeks Persepsi Korupsi adalah alat ukur dunia yang dibuat dan dikeluarkan tiap tahun oleh *Transparency International* sejak 1995. Indeks ini mengukur seberapa parah korupsi di pemerintahan di berbagai negara, berdasarkan penilaian ahli dan survei bisnis. Skornya mulai dari 0 sampai 100. Skor 0 berarti korupsi sangat korup, sedangkan skor 100 berarti nyaris tidak ada korupsi atau sangat bersih. Metodologi pengukuran melibatkan agregasi data dari berbagai sumber independen yang menangkap persepsi korupsi, seperti penyuapan, pengalihan dana publik, nepotisme pada layanan publik, dan efektivitas upaya anti-korupsi.

IPK menjadi tolok ukur penting untuk mengidentifikasi sejauh mana upaya pemberantasan korupsi dilakukan oleh suatu negara. Skor yang rendah menunjukkan bahwa korupsi masih menjadi tantangan signifikan yang bisa menghambat pembangunan ekonomi, mengurangi efisiensi birokrasi, dan merusak kepercayaan masyarakat serta investor. Dalam konteks ekonomi, negara-negara dengan IPK yang tinggi (korupsi rendah) biasanya memiliki iklim investasi yang lebih baik, tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, dan pertumbuhan ekonomi yang lebih stabil (Lambsdorff Graff, 2006).

Tabel 5.1 Perkembangan Indeks Persepsi Korupsi di ASEAN Tahun 2012-2023

Negara	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Indonesia	32	32	34	36	37	37	38	40	37	38	34	34	**35,75**
Myanmar	15	21	21	22	28	30	29	29	28	28	23	20	**24,50**
Laos	21	26	25	25	30	29	29	29	29	30	31	28	**27,67**
Filipina	34	36	38	35	35	34	36	34	34	33	33	34	**34,67**
Thailand	37	35	38	38	35	37	36	36	36	35	36	35	**36,17**
Kamboja	22	20	21	21	21	21	20	20	21	23	24	22	**21,33**
Vietnam	31	31	31	31	33	35	33	37	36	39	42	41	**35,00**
Timor Leste	33	30	28	28	35	38	35	38	40	41	42	43	**35,92**
Malaysia	49	50	52	50	49	47	47	53	51	48	47	50	**49,42**
Singapura	87	86	84	85	84	84	85	85	85	85	83	83	**84,67**
Rata-rata Tahunan	**36,10**	**36,70**	**37,20**	**37,10**	**38,70**	**39,20**	**38,80**	**40,10**	**39,70**	**40,00**	**39,50**	**39,00**	**38,51**

Sumber: Data diolah, 2025

Pada tabel 5.1, dapat dilihat selama periode 2012-2023, Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di negara-negara ASEAN menunjukkan kesenjangan signifikan dengan Singapura secara konsisten memimpin dengan rata-rata 84,67, jauh di atas negara-negara lain, diikuti Malaysia sebesar 49,42, sedangkan Kamboja menempati posisi terakhir dengan angka 21,33. Tren regional menunjukkan peningkatan moderat dari rata-rata 36,10 pada 2012 menjadi 39,00 pada 2023, dengan pencapaian tertinggi pada 2019 sebesar 40,10, namun sejak 2020 terjadi stagnasi dan bahkan sedikit penurunan. Negara yang menunjukkan perbaikan konsisten adalah Timor Leste, naik dari 33 menjadi 43 dalam 12 tahun, dan Vietnam yang berhasil meningkatkan skornya dari 31 menjadi 41. Sebaliknya, Indonesia mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun dalam beberapa tahun terakhir dari puncak 40 pada 2019 menjadi 34 pada 2023, menandakan tantangan berkelanjutan dalam upaya pemberantasan korupsi.

1. Indonesia

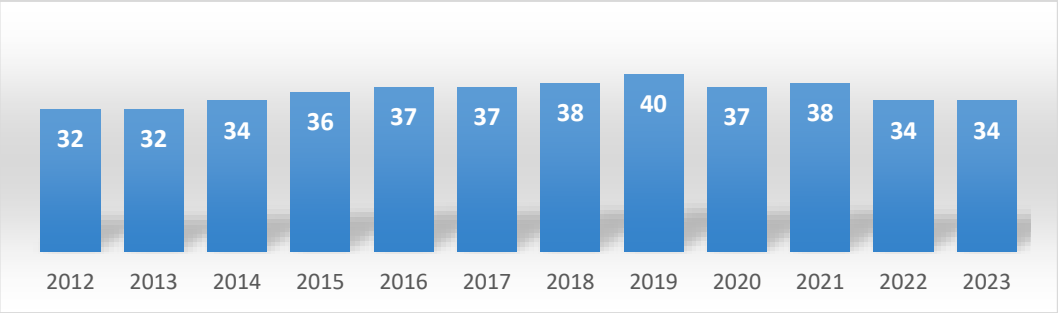

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.1 Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menunjukkan tren naik dari skor 32 pada 2012 hingga mencapai puncaknya di angka 40 pada 2019. Peningkatan ini mencerminkan persepsi publik yang lebih positif terhadap upaya pemberantasan korupsi saat itu. Namun, setelah 2019, skor IPK menurun signifikan menjadi 34 pada 2022 dan stagnan hingga 2023. Penurunan ini mengindikasikan menurunnya kepercayaan terhadap efektivitas lembaga antikorupsi dan penegakan hukum di Indonesia.

Di Indonesia, lemahnya integritas politik, revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019, serta rendahnya transparansi dalam kebijakan publik turut menyebabkan menurunnya skor IPK. Misalnya, selama pandemi COVID-19, terjadi berbagai penyalahgunaan anggaran dan lemahnya pengawasan terhadap

dana bantuan sosial (Suyatmiko, 2021). Hal ini memperburuk persepsi publik dan internasional terhadap keseriusan Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Selain itu, kondisi ketimpangan ekonomi, tingkat kemiskinan, dan pengangguran juga memperkuat budaya korupsi di Indonesia karena sistem distribusi sumber daya yang tidak adil (Karimi et al., 2023). Rendahnya skor IPK Indonesia bahkan telah berpengaruh pada turunnya minat investasi asing langsung karena rendahnya kepastian hukum dan tingginya biaya transaksi akibat korupsi (Purnama, 2022).

2. Myanmar

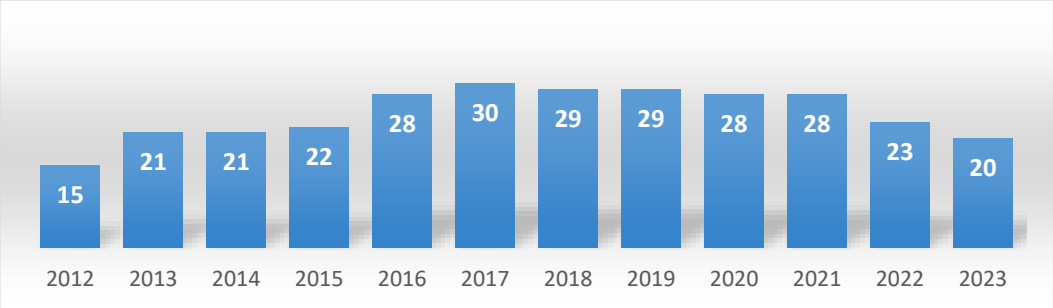

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.2 Indeks Persepsi Korupsi Myanmar Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi Myanmar menunjukkan tren meningkat dari skor 15 pada 2012 hingga mencapai puncaknya di angka 30 pada 2017. Kenaikan ini mencerminkan perbaikan persepsi terhadap keseriusan pemerintah dalam memberantas korupsi, terutama melalui kampanye antikorupsi yang gencar dilakukan. Namun, setelah 2017, IPK Myanmar stagnan di kisaran 28–29 sebelum akhirnya menurun tajam menjadi 23 pada 2022 dan 20 pada 2023. Penurunan ini menunjukkan tantangan baru dalam mempertahankan kepercayaan publik terhadap integritas birokrasi dan efektivitas reformasi antikorupsi di Myanmar.

3. Laos

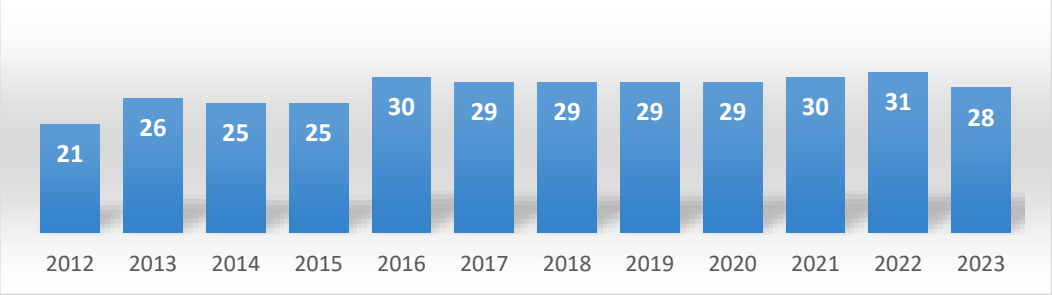

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.3 Indeks Persepsi Korupsi Laos Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi Laos menunjukkan tren kenaikan dari skor 21 pada 2012 hingga mencapai 31 pada 2022. Peningkatan ini mencerminkan persepsi publik yang lebih baik terhadap komitmen pemerintah dalam mengatasi korupsi, meskipun berlangsung secara bertahap. Selama periode 2016–2021, skor IPK Laos relatif stabil di kisaran 29–30, menandakan konsistensi kebijakan antikorupsi namun dengan dampak terbatas. Pada 2023, terjadi penurunan menjadi 28, yang mengindikasikan masih adanya tantangan dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas di sektor publik.

4. Filipina

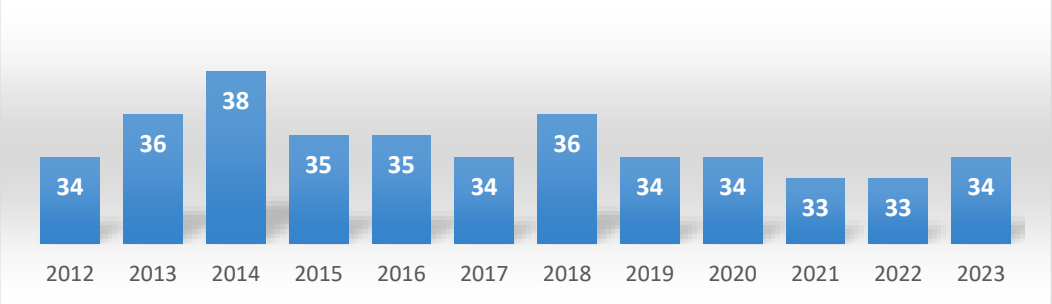

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.4 Indeks Persepsi Korupsi Filipina Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Filipina menunjukkan fluktuasi selama periode 2012–2023, dengan skor tertinggi 38 pada 2014 dan terendah 33 pada 2021–2022. Setelah peningkatan signifikan hingga 2014, tren IPK menurun dan cenderung stagnan, mencerminkan ketidakpastian dalam konsistensi pemberantasan korupsi. Meskipun sempat naik kembali ke 36 pada 2018, penurunan berlanjut di tahun berikutnya. Pada 2023, skor kembali 34, menunjukkan rendahnya persepsi publik terhadap efektivitas kebijakan antikorupsi di Filipina.

5. Thailand

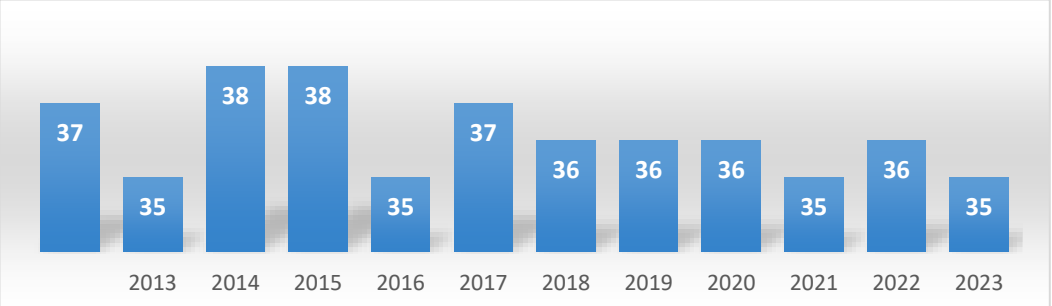

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.5 Indeks Persepsi Korupsi Thailand Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi Thailand menunjukkan fluktuasi skor dari tahun 2013 hingga 2023. Skor tertinggi dicapai pada tahun 2014-2015 dengan nilai 38, sementara skor terendah terjadi pada tahun 2013, 2016, 2021, dan 2023 yaitu sebesar 35. Meskipun sempat mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga 2020, skor tersebut kembali stagnan di angka 35–36 dalam tiga tahun terakhir. Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan tata kelola dan pemberantasan korupsi di Thailand masih menghadapi tantangan yang signifikan.

6. Kamboja

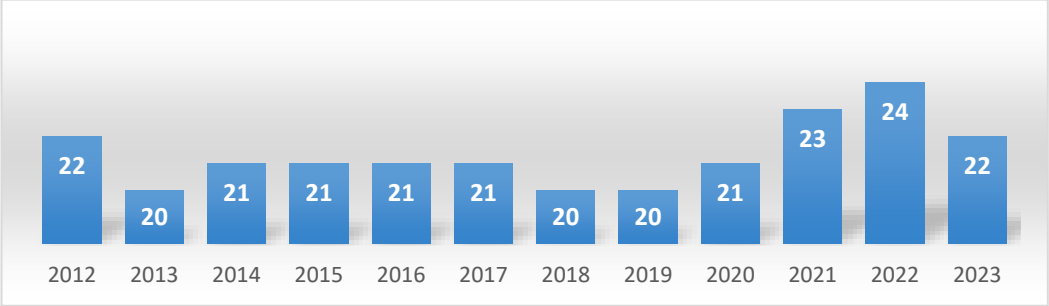

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.6 Indeks Persepsi Korupsi Kamboja Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi Kamboja dari tahun 2012 hingga 2023 menunjukkan kecenderungan skor yang rendah dan fluktuatif. Selama sebagian besar periode tersebut, skor Kamboja stagnan di kisaran 20–21, mencerminkan tantangan besar dalam pemberantasan korupsi. Peningkatan signifikan terlihat pada tahun 2021 dan 2022 dengan skor mencapai 23 dan 24, namun kembali turun ke angka 22 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, perbaikan antikorupsi di Kamboja masih belum konsisten dan rentan mengalami kemunduran.

Kamboja menempati posisi IPK terendah di antara negara ASEAN dengan rata-rata skor hanya 21,33, yang mencerminkan lemahnya lembaga antikorupsi, minimnya partisipasi masyarakat sipil, serta dominasi praktik korupsi yang bersifat sistemik dalam birokrasi (Mufidah et al., 2025). Tidak adanya reformasi hukum yang signifikan dan keterbatasan sumber daya dalam pemberantasan korupsi membuat korupsi di Kamboja menjadi bagian dari sistem pemerintahan yang sulit diberantas.

7. Vietnam

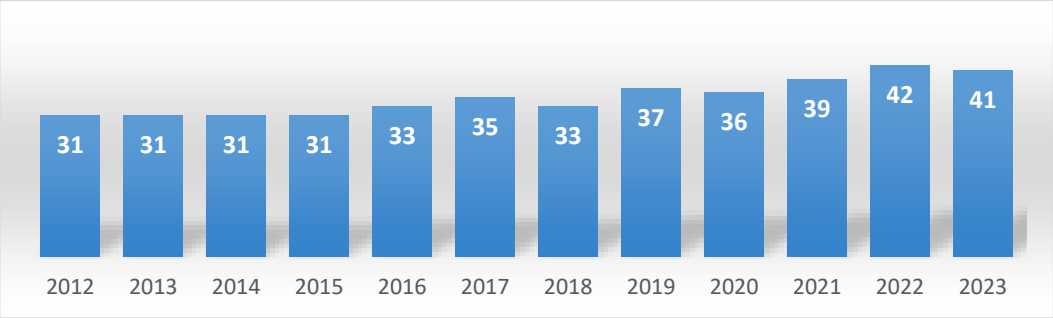

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.7 Indeks Persepsi Korupsi Vietnam Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi Vietnam menunjukkan tren peningkatan yang cukup stabil dari tahun 2012 hingga 2023. Skor Vietnam naik dari 31 pada tahun 2012 menjadi 41 pada tahun 2023, dengan lonjakan signifikan terjadi setelah tahun 2016. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam upaya pemberantasan korupsi dan perbaikan tata kelola pemerintahan. Meskipun sempat mengalami sedikit penurunan di tahun 2018 dan 2023, tren keseluruhan tetap positif dan menunjukkan arah reformasi yang menjanjikan.

8. Timor Leste

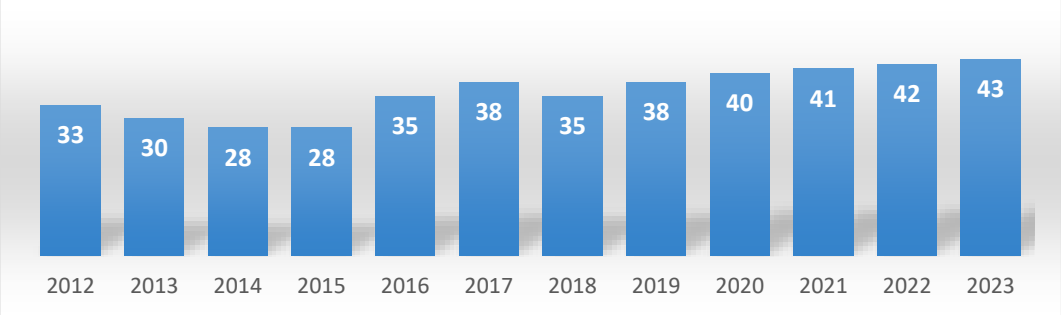

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.8 Indeks Persepsi Korupsi Timor Leste Tahun 2012-2023

Data Indeks Persepsi Korupsi Timor Leste menunjukkan tren peningkatan yang positif dari tahun 2012 hingga 2023. Setelah mengalami penurunan pada periode 2013–2015 dengan skor terendah 28, indeks mulai membaik secara konsisten sejak 2016. Skor terus meningkat hingga mencapai 43 pada tahun 2023, menjadikan Timor Leste sebagai salah satu negara dengan kemajuan signifikan dalam pemberantasan korupsi di kawasan. Hal ini mencerminkan upaya reformasi tata kelola yang semakin efektif dan mendapat pengakuan internasional.

9. Malaysia

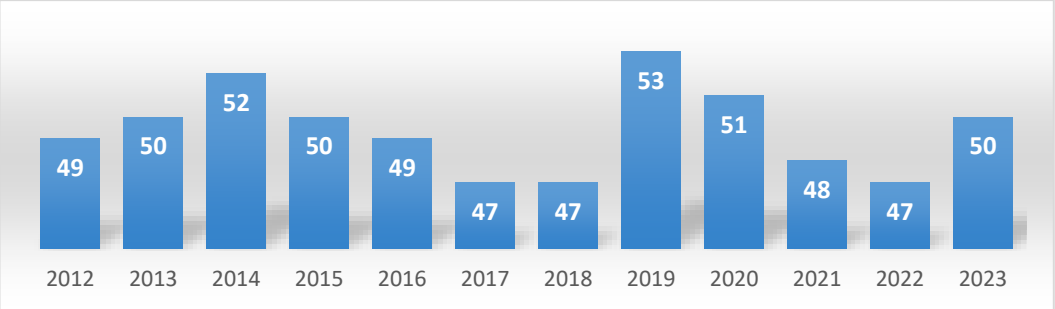

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.9 Indeks Persepsi Korupsi Malaysia Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi Malaysia menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan sepanjang tahun 2012 hingga 2023. Skor tertinggi dicapai pada tahun 2019 dengan nilai 53, mencerminkan momentum reformasi antikorupsi yang kuat saat itu. Namun, skor kembali menurun hingga ke angka 47 pada tahun 2022 sebelum sedikit membaik menjadi 50 pada tahun 2023. Secara keseluruhan, tren ini menunjukkan bahwa stabilitas dan konsistensi dalam upaya pemberantasan korupsi masih menjadi tantangan bagi Malaysia.

10. Singapura

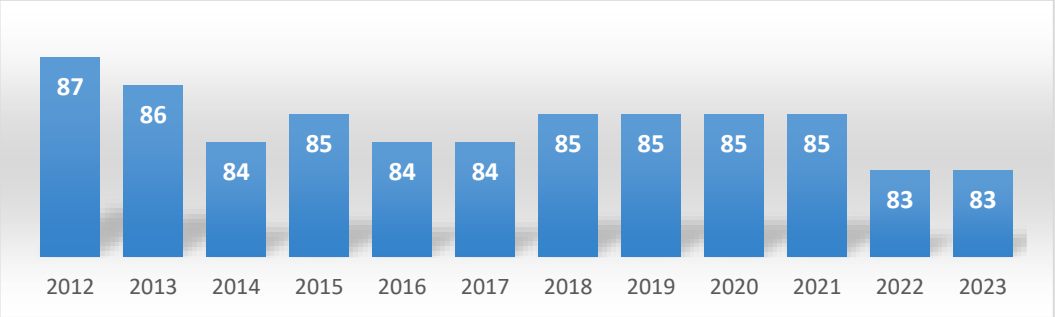

Sumber: *Transparency International*, 2024

Gambar 5.10 Indeks Persepsi Korupsi Singapura Tahun 2012-2023

Indeks Persepsi Korupsi Singapura menunjukkan skor yang sangat tinggi dan relatif stabil dari tahun 2012 hingga 2023. Skor tertinggi dicapai pada tahun 2012 sebesar 87, kemudian sedikit menurun dan bertahan di kisaran 84–85 hingga tahun 2021. Namun, terjadi sedikit penurunan ke angka 83 pada tahun 2022 dan 2023. Meskipun demikian, Singapura tetap menjadi salah satu negara dengan tingkat korupsi terendah di dunia, mencerminkan sistem tata kelola dan penegakan hukum yang kuat.

Berbeda dengan sembilan negara lainnya, Singapura memiliki tingkat korupsi paling rendah dan paling bersih di ASEAN. Tingginya skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) di Singapura mencerminkan efektivitas penegakan hukum yang tegas dan terpusat melalui lembaga independen, yaitu Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB), yang bertanggung jawab secara eksklusif atas semua kasus korupsi, termasuk di sektor swasta. Pendekatan ini membuat penegakan hukum lebih efisien dan minim konflik kewenangan, berbeda dengan Indonesia yang memiliki banyak lembaga penegak hukum seperti KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan, namun kerap mengalami tumpang tindih tugas dan lemahnya koordinasi (Tangahu, 2025).

5.1.2 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah ketika suatu negara mampu menghasilkan lebih banyak barang dan jasa dibanding sebelumnya. Cara mengukurnya adalah dengan melihat perubahan persentase PDB riil. PDB riil adalah nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, yang sudah disesuaikan dengan inflasi sehingga bisa memberikan gambaran yang lebih akurat tentang perkembangan ekonomi. Indikator ini menjadi tolok ukur penting kesehatan ekonomi karena mencerminkan peningkatan standar hidup, penciptaan lapangan kerja baru, dan kemampuan negara menghasilkan kekayaan tambahan yang dapat diinvestasikan untuk pembangunan masa depan.

Berbagai faktor mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, mulai dari akumulasi modal dan investasi, kemajuan teknologi dan inovasi, peningkatan produktivitas tenaga kerja, stabilitas politik dan institusional, hingga kebijakan ekonomi dan perdagangan yang kondusif. Sumber daya alam, kondisi geografi, dan kualitas modal manusia melalui pendidikan dan pengembangan keterampilan juga berperan signifikan. Meskipun pertumbuhan PDB menjadi target utama kebanyakan pemerintah, perspektif modern juga mempertimbangkan aspek kualitas pertumbuhan, termasuk keberlanjutan lingkungan, pemerataan distribusi pendapatan, dan dampaknya terhadap kesejahteraan sosial secara menyeluruh, sehingga konsep pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan kini menjadi fokus utama dalam agenda pembangunan global.

Tabel 5.2 Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN Tahun 2012-2023 (%)

Negara	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Rata-rata
Indonesia	6,0	5,6	5,0	4,9	5,0	5,1	5,2	5,0	-2,1	3,7	5,3	5,0	**4,06**
Myanmar	7,3	8,4	8,2	7,0	5,9	6,1	6,3	6,6	-9,0	-12,0	4,0	1,0	**3,32**
Laos	8,0	8,0	7,6	7,3	7,0	6,9	6,2	5,5	0,5	2,5	2,7	3,7	**5,49**
Filipina	6,9	6,8	6,3	6,3	7,1	6,9	6,3	6,1	-9,5	5,7	7,6	5,5	**5,17**
Thailand	7,2	2,7	1,0	3,1	3,4	4,2	4,2	2,1	-6,1	1,6	2,5	1,9	**2,32**
Kamboja	2,7	2,9	3,1	3,1	2,8	3,5	3,3	2,7	-2,9	6,4	3,2	2,8	**2,80**
Vietnam	5,5	5,6	6,4	7,0	6,7	6,9	7,5	7,4	2,9	2,6	8,1	5,0	**5,97**
Timor Leste	4,9	3,1	4,5	2,5	3,0	-3,2	-0,5	24,2	31,7	5,4	-20,6	-18,1	**3,08**
Malaysia	5,5	4,7	6,0	5,1	4,4	5,8	4,8	4,4	-5,5	3,3	8,9	3,6	**4,25**
Singapura	4,4	4,8	3,9	3,0	3,6	4,5	3,5	1,3	-3,9	9,7	3,8	1,1	**3,31**
Rata-rata Tahunan	**5,84**	**5,26**	**5,20**	**4,93**	**4,89**	**4,67**	**4,68**	**6,53**	**0,61**	**2,89**	**2,55**	**1,15**	**4,10**

Sumber: Data diolah, 2025

Pada tabel 5.2, dapat dilihat selama periode 2012-2023, kawasan ASEAN mengalami fluktuasi pertumbuhan ekonomi yang signifikan dengan rata-rata regional 4,10%. Vietnam mencatat pertumbuhan rata-rata tertinggi sebesar 5,97%, diikuti oleh Laos dengan angka 5,49% dan Filipina 5,17%, sementara Thailand mencatatkan pertumbuhan terendah sebanyak 2,32%. Pandemi COVID-19 pada 2020 menyebabkan kontraksi dramatis di hampir seluruh kawasan, dengan Filipina dengan angka -9,5% dan Myanmar -9,0% mengalami dampak terparah, sementara Vietnam tetap bertahan dengan pertumbuhan positif 2,9%. Timor Leste menunjukkan pertumbuhan tertinggi justru di tahun 2020 sebesar 31,7% dan 2019 24,2%, namun juga mengalami kontraksi terparah pasca-pandemi hingga -20,6% di tahun 2022 dan -18,1% di tahun 2023. Indonesia menunjukkan ketahanan dengan hanya mengalami kontraksi -2,1% pada 2020 dan mampu pulih ke level 5% pada 2023, mendekati rata-rata pra-pandeminya.

1. Indonesia

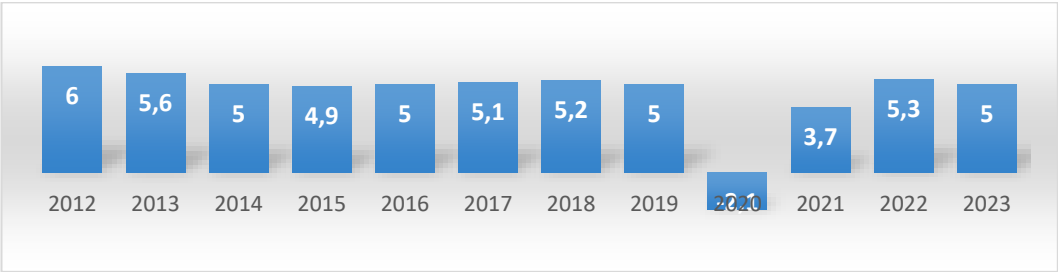

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.11 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Indonesia dari tahun 2012 hingga 2023 menunjukkan fluktuasi yang cukup signifikan. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 6%, kemudian mengalami penurunan bertahap hingga 4,9% pada 2015. Tahun 2020 mencatat penurunan tajam ke titik terendah sebesar -2,1% akibat dampak pandemi COVID-19. Namun, setelah itu ekonomi mulai pulih dengan pertumbuhan 3,7% pada 2021 dan stabil di sekitar 5% pada tahun-tahun berikutnya.

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode 2012–2023 tergolong cukup stabil, dengan rata-rata sebesar 4,06% dan berada di posisi keanam tertinggi di kawasan ASEAN. Kinerja ini didukung oleh perbaikan pada sisi konsumsi domestik, meskipun masih dihadapkan pada tantangan seperti tingkat kemiskinan yang fluktuatif dan pengangguran yang cukup tinggi, terutama pascapandemi (Mufidah et al., 2025). Di sisi lain, tingkat korupsi yang masih tinggi turut menghambat efisiensi alokasi sumber daya dan menurunkan kualitas tata kelola pembangunan ekonomi (Suyatmiko, 2021). Meskipun demikian, investasi asing langsung (FDI) di Indonesia tetap tinggi, mencapai 20,1 Miliar USD pada 2021, menjadikannya negara penerima FDI terbesar kedua di ASEAN setelah Singapura, yang menunjukkan bahwa potensi pasar domestik Indonesia masih menarik bagi investor (Purnama, 2022).

2. Myanmar

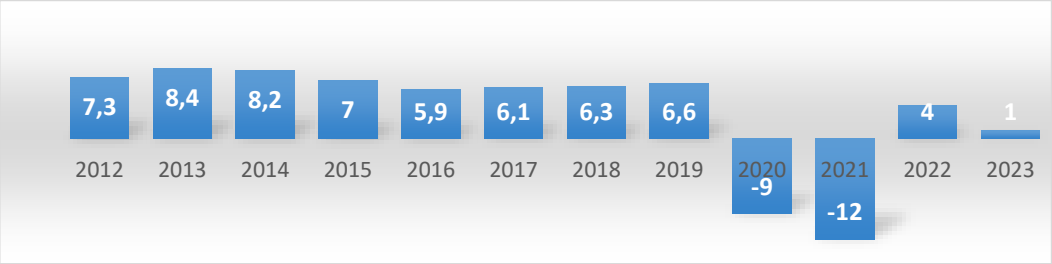

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.12 Pertumbuhan Ekonomi Myanmar Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Myanmar dari tahun 2012 hingga 2023 menunjukkan tren yang awalnya kuat namun kemudian mengalami kontraksi tajam. Pada periode 2012–2015, pertumbuhan ekonomi relatif tinggi, mencapai puncaknya sebesar 8,4% pada 2013. Setelah itu, pertumbuhan melambat namun tetap stabil hingga 2019, sebelum anjlok drastis menjadi -9% pada 2020 dan -12%

pada 2021, kemungkinan besar akibat pandemi serta krisis politik. Pemulihan terjadi perlahan dengan pertumbuhan 4% pada 2022 dan hanya 1% pada 2023.

3. Laos

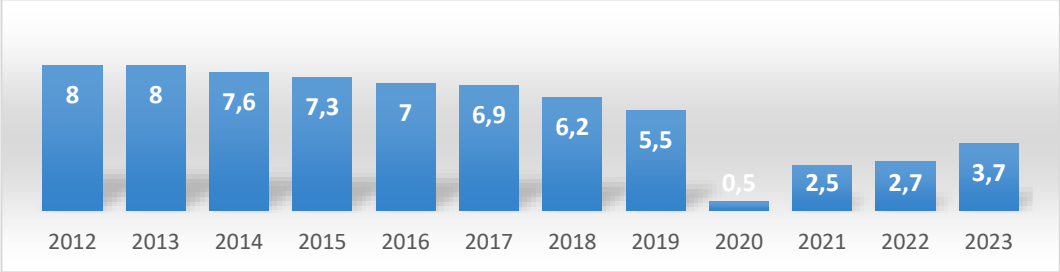

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.13 Pertumbuhan Ekonomi Laos Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Laos dari tahun 2012 hingga 2023 menunjukkan tren penurunan yang bertahap. Pada tahun 2012 dan 2013, Laos mencatat pertumbuhan tinggi sebesar 8%, namun angka ini terus menurun hingga mencapai 5,5% pada 2019. Pandemi COVID-19 berdampak besar pada ekonomi Laos, terlihat dari anjloknya pertumbuhan menjadi hanya 0,5% pada 2020. Meskipun demikian, ekonomi mulai pulih secara perlahan, dengan pertumbuhan mencapai 3,7% pada 2023.

4. Filipina

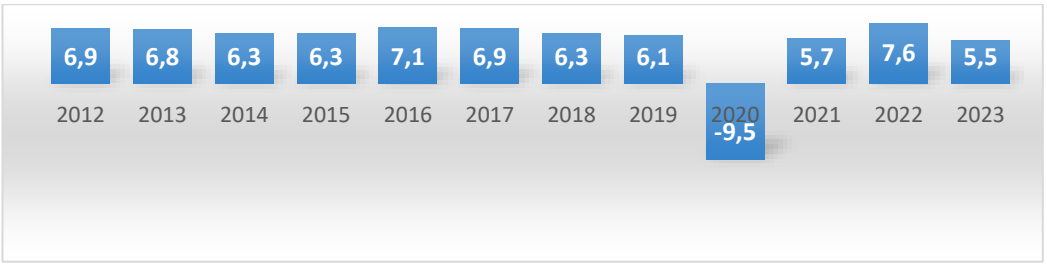

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.14 Pertumbuhan Ekonomi Filipina Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Filipina tahun 2012–2023 menunjukkan pola yang relatif stabil hingga tahun 2019, dengan rata-rata pertumbuhan di atas 5%. Puncaknya terjadi pada 2016 sebesar 7,1%, sebelum sedikit menurun di tahun-tahun berikutnya. Pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi tajam pada 2020 sebesar -9,5%, yang menjadi titik terendah dalam periode ini. Namun, pemulihan berlangsung cepat, dengan pertumbuhan melonjak menjadi 7,6% pada 2022 sebelum kembali melandai ke 5,5% pada 2023.

5. Thailand

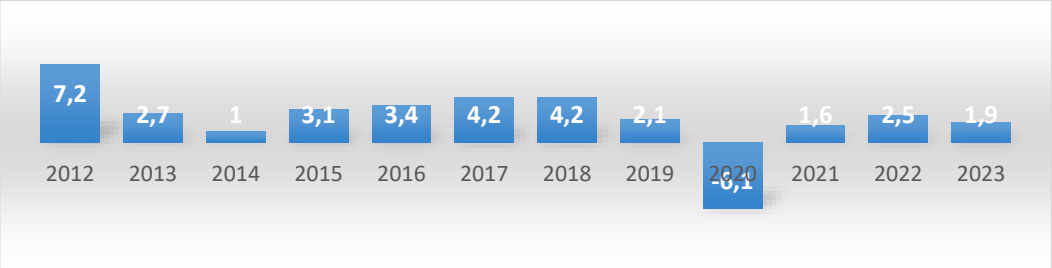

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.15 Pertumbuhan Ekonomi Thailand Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Thailand selama periode 2012–2023 mengalami fluktuasi yang cukup besar. Pada awal periode, pertumbuhan berada di kisaran 7,2% pada 2012 namun menurun tajam menjadi 1% pada 2014. Selanjutnya, pertumbuhan relatif stabil di kisaran 2–4% hingga terjadi kontraksi besar sebesar -6,1% pada 2020 akibat pandemi. Ekonomi Thailand mulai pulih secara perlahan dengan pertumbuhan 1,6% pada 2021, naik menjadi 2,5% pada 2022, dan 1,9% pada 2023.

Thailand mencatat pertumbuhan ekonomi yang paling rendah di antara negara-negara ASEAN, dengan rata-rata hanya 2,32% selama 2012–2023. Faktor utama penyebab rendahnya pertumbuhan ekonomi di Thailand adalah instabilitas politik yang berkepanjangan, berdampak pada terganggunya konsistensi kebijakan fiskal dan investasi (Mufidah et al., 2025). Selain itu, negara ini juga menghadapi perlambatan pada sektor industri dan pariwisata sebagai penopang utama ekonomi, terutama saat pandemi. Korupsi dan birokrasi yang berbelit-belit turut memperburuk iklim usaha, sehingga menghambat aliran investasi baru (Suyatmiko, 2021). Rendahnya daya saing ekonomi Thailand dibanding negara tetangganya menjadi tantangan tersendiri yang perlu segera diatasi (Karimi et al., 2023).

6. Kamboja

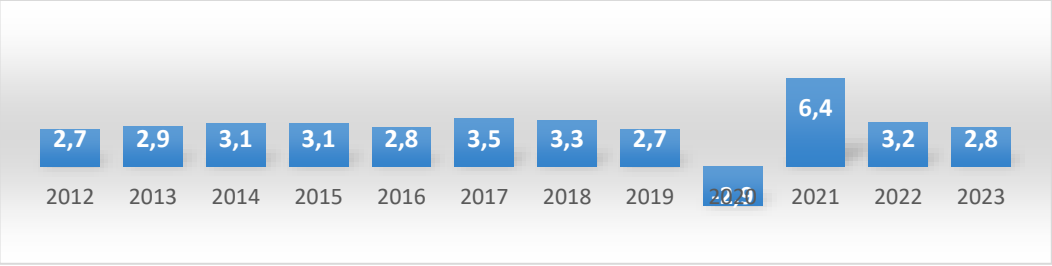

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.16 Pertumbuhan Ekonomi Kamboja Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Kamboja periode 2012-2023 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan rata-rata 2,80% per tahun. Tahun 2020 mencatat kontraksi ekonomi sebesar -2,9% akibat dampak pandemi COVID-19 terhadap aktivitas ekonomi domestik. Pemulihan ekonomi terjadi signifikan pada 2021 dengan pertumbuhan mencapai 6,4%, merupakan yang tertinggi dalam periode tersebut. Pasca-pemulihan, pertumbuhan ekonomi kembali menstabilkan pada level 3,2%-2,8% di tahun 2022-2023, mengindikasikan normalisasi kondisi ekonomi pascapandemi.

7. Vietnam

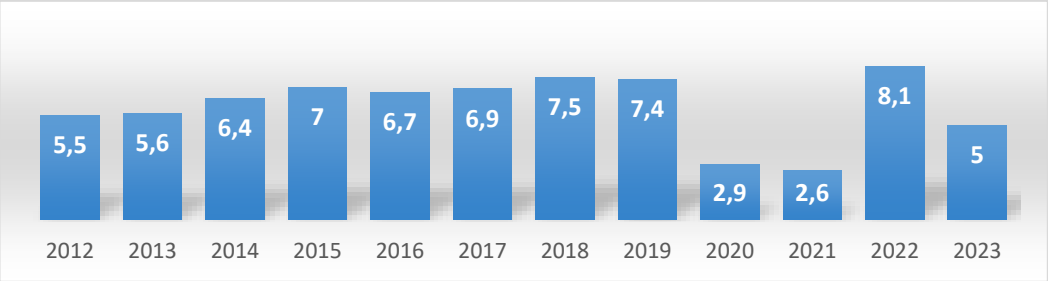

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.17 Pertumbuhan Ekonomi Vietnam Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Vietnam periode 2012-2023 menunjukkan tren yang cenderung meningkat dengan rata-rata 5,97% per tahun. Periode 2015-2019 mencatat performa ekonomi yang solid dengan pertumbuhan konsisten di atas 6,7%, dimana tahun 2018 dan 2019 mencapai puncaknya dengan masing-masing 7,5% dan 7,4%. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan perlambatan signifikan pada 2020-2021 dengan pertumbuhan turun drastis menjadi 2,9% dan 2,6%. Pemulihan ekonomi Vietnam terjadi dengan cepat pada 2022 yang mencatat pertumbuhan tertinggi sebesar 8,1%, sebelum melambat kembali menjadi 5% di tahun 2023 sebagai bagian dari normalisasi pascapandemi.

Vietnam mencatat pertumbuhan ekonomi tertinggi di ASEAN dengan rata-rata sebesar 5,97% selama periode 2012–2023. Keberhasilan ini dikaitkan dengan stabilitas politik yang tinggi dan konsistensi dalam menerapkan kebijakan industrialisasi serta modernisasi yang berorientasi ekspor (Mufidah et al., 2025). Pemerintah Vietnam secara aktif mendorong pengembangan sektor teknologi dan manufaktur serta berhasil menjaga lingkungan investasi yang kompetitif. Faktor-faktor tersebut mempercepat pemulihan pascapandemi COVID-19 dan

menurunkan angka kemiskinan secara signifikan, hingga mencapai hanya 3,4% pada 2023, yang merupakan angka terendah di ASEAN (Mufidah et al., 2025). Rendahnya tingkat korupsi dibanding negara-negara berkembang lain di kawasan juga menjadi daya tarik tersendiri bagi masuknya modal asing (Purnama, 2022).

8. Timor Leste

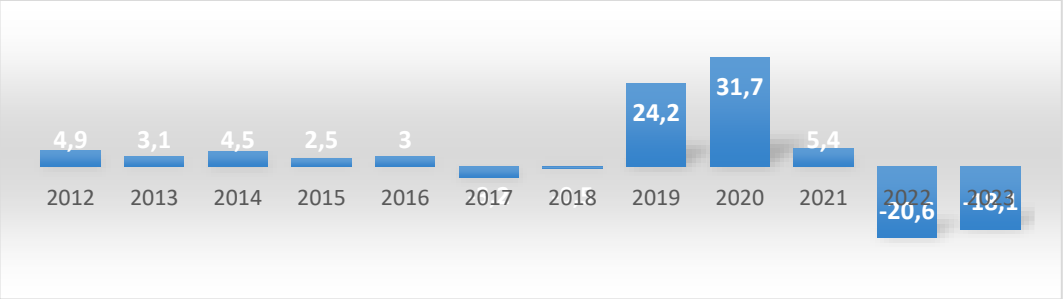

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.18 Pertumbuhan Ekonomi Timor Leste Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Timor Leste periode 2012-2023 menunjukkan volatilitas yang sangat tinggi dengan fluktuasi ekstrem antar tahun. Periode 2012-2018 mencatat pertumbuhan yang relatif rendah dan stagnan, bahkan mengalami kontraksi pada 2017 sebesar -3,2%. Tahun 2019-2020 menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang luar biasa dengan masing-masing 24,2% dan 31,7%, kemungkinan didorong oleh proyek-proyek pembangunan infrastruktur besar atau sektor minyak dan gas. Namun, ekonomi kembali mengalami kontraksi tajam pada 2022-2023 dengan pertumbuhan negatif -20,6% dan -18,1%, mengindikasikan ketidakstabilan struktural ekonomi yang sangat bergantung pada sektor tertentu, yaitu sektor minyak dan gas.

9. Malaysia

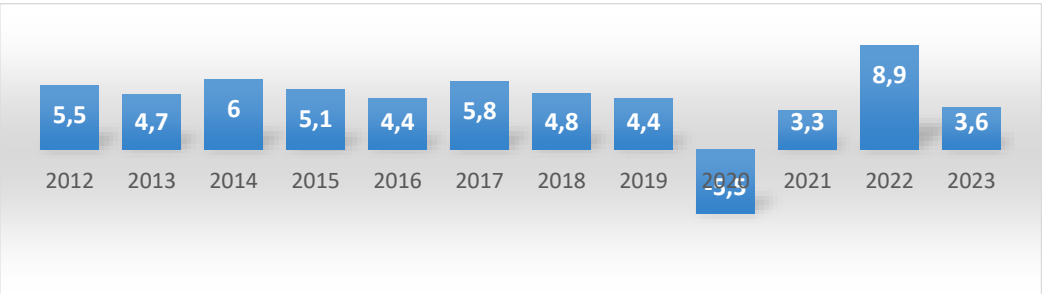

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.19 Pertumbuhan Ekonomi Malaysia Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Malaysia periode 2012-2023 menunjukkan tren yang relatif stabil dengan rata-rata 4,25% per tahun, meskipun mengalami fluktuasi

moderat. Periode 2012-2017 mencatat performa yang bervariasi dengan puncak pertumbuhan tertinggi pada 2014 sebesar 6%, diikuti perlambatan bertahap hingga mencapai titik terendah 4,4% pada 2016 dan 2019. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -5,5% pada 2020, diikuti pemulihan bertahap dengan pertumbuhan 3,3% di 2021. Tahun 2022 menunjukkan pemulihan yang kuat dengan pertumbuhan mencapai 8,9%, sebelum kembali melambat menjadi 3,6% pada 2023 sebagai bagian dari normalisasi ekonomi pascapandemi.

10. Singapura

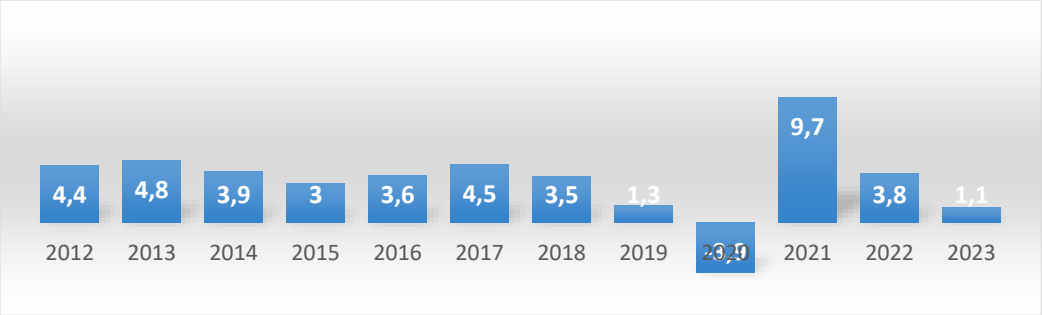

Sumber: *World Bank*, 2024

Gambar 5.20 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2012-2023

Pertumbuhan ekonomi Singapura periode 2012-2023 menunjukkan tren perlambatan gradual dengan rata-rata 3,31% per tahun. Periode 2012-2018 mencatat penurunan bertahap dari 4,4% menjadi 3,5%, dengan fluktuasi minor yang mengindikasikan transisi menuju ekonomi maju yang lebih matang. Dampak pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi ekonomi sebesar -3,9% pada 2020, diikuti pemulihan spektakuler pada 2021 dengan pertumbuhan 9,7% yang merupakan tertinggi dalam periode tersebut. Pasca-pemulihan, pertumbuhan ekonomi kembali menstabilkan pada level yang lebih rendah dengan 3,8% di 2022 dan 1,1% di 2023, mencerminkan normalisasi ekonomi dan tantangan struktural sebagai ekonomi maju.

5.2 Hubungan Kausalitas Indeks Persepsi Korupsi dan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN Tahun 2012-2023

5.2.1 Uji Stasioneritas

Uji stasioneritas merupakan sebuah metode statistik yang bertujuan untuk mengevaluasi apakah data deret waktu bersifat stasioner, yaitu statistik seperti rata-rata dan varians yang konstan sepanjang waktu dan tidak bergantung pada periode

pengamatan. Uji ini diperlukan dalam analisis deret waktu karena banyak model ekonometrik dan peramalan mengasumsikan data bersifat stasioner untuk menghasilkan prediksi yang valid. Beberapa teknik populer dalam uji stasioneritas meliputi uji Augmented Dickey-Fuller (ADF), Phillips-Perron (PP), dan Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin (KPSS).

1. Hasil Uji Stasioneritas Variabel Indeks Persepsi Korupsi

Tabel 5.3 Hasil Uji Stasioneritas Variabel Indeks Persepsi Korupsi

Statistik	Probabilitas
-5.84789	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji stasioneritas pada variabel Indeks Persepsi Korupsi pada tingkat *first difference* menunjukkan bahwa data telah stasioner. Berdasarkan uji Levin, Lin & Chu (LLC) diperoleh nilai statistik -5.84789 dengan probabilitas 0.0000 (<0.05), artinya data menjadi stasioner setelah didiferensiasi sebanyak satu kali.

2. Hasil Uji Stasioneritas Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 5.4 Hasil Uji Stasioneritas Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Statistik	Probabilitas
-6.17962	0.0000

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji stasioneritas pada variabel Pertumbuhan Ekonomi pada tingkat *level* menunjukkan bahwa data sudah stasioner. Berdasarkan uji Levin, Lin & Chu (LLC) diperoleh nilai statistik -6.17962 dengan probabilitas 0.0000 (<0.05), hasil ini menunjukkan bahwa variabel Pertumbuhan Ekonomi dapat langsung digunakan dalam model tanpa perlu dilakukan diferensiasi karena sudah memenuhi syarat stasioneritas.

5.2.2 Penentuan Lag Optimum

Penentuan lag optimum dalam uji kausalitas Granger adalah proses pemilihan lag yang tepat untuk menentukan validitas hasil uji Granger karena lag yang terlalu pendek dapat menghasilkan bias spesifikasi dan menghilangkan informasi penting tentang hubungan dinamis antar variabel, karena lag terlalu panjang dapat mengurangi derajat kebebasan dan kekuatan uji statistik. Penentuan lag optimum biasanya dilakukan dengan mengestimasi beberapa model VAR

dengan panjang lag berbeda, kemudian memilih model terbaik berdasarkan kriteria informasi seperti *Akaike Information Criterion* (AIC), *Schwarz Criterion* (SC), dan *Hannan-Quinn* (HQ). Lag yang menghasilkan nilai kriteria informasi terendah dipilih sebagai lag optimum untuk digunakan dalam uji kausalitas Granger.

1. Hasil Lag 1

Tabel 5.5 Hasil Uji Lag 1

AIC	SC	HQ
4.371169	4.444819	4.401042

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji penentuan lag optimum pada Lag 1 menunjukkan nilai kriteria informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebaikan model, yaitu *Akaike information criterion* (AIC) sebesar 4.371169, *Schwarz criterion* (SC) sebesar 4.444819, dan *Hannan-Quinn criterion* (HQ) sebesar 4.401042. Ketiga kriteria informasi ini merupakan alat statistik yang digunakan untuk membandingkan model dengan panjang lag berbeda, di mana nilai yang lebih kecil mengindikasikan model yang lebih baik. Nilai-nilai ini akan dibandingkan dengan nilai kriteria informasi pada lag-lag lainnya untuk menentukan struktur lag yang optimal.

2. Hasil Lag 2

Tabel 5.6 Hasil Uji Lag 2

AIC	SC	HQ
4.304946	4.435205	4.357664

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji penentuan lag optimum pada Lag 2 menunjukkan nilai kriteria informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebaikan model, yaitu *Akaike information criterion* (AIC) sebesar 4.304946, *Schwarz criterion* (SC) sebesar 4.435205, dan *Hannan-Quinn criterion* (HQ) sebesar 4.357664. Ketiga kriteria informasi ini merupakan alat statistik yang berfungsi sebagai indikator untuk membandingkan model dengan jumlah lag berbeda, di mana nilai yang lebih kecil menandakan model yang lebih baik. Dibandingkan dengan hasil pada Lag 1, nilai AIC pada Lag 2 lebih rendah (4.304946 < 4.371169), yang mengindikasikan bahwa model dengan Lag 2 memiliki keseimbangan yang lebih baik antara kesesuaian model dan kesederhanaan model.

3. Hasil Lag 3

Tabel 5.7 Hasil Uji Lag 3

AIC	SC	HQ
4.337807	4.532237	4.416213

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil uji penentuan lag optimum pada Lag 3 menunjukkan nilai kriteria informasi yang dapat digunakan untuk mengevaluasi kebaikan model, yaitu *Akaike information criterion* (AIC) sebesar 4.337807, *Schwarz criterion* (SC) sebesar 4.532237, dan *Hannan-Quinn criterion* (HQ) sebesar 4.416213. Dibandingkan dengan hasil pada Lag 2, nilai AIC pada Lag 3 lebih tinggi (4.337807 > 4.304946), begitu juga dengan nilai SC (4.532237 > 4.435205) dan HQ (4.416213 > 4.357664), yang mengindikasikan bahwa model dengan Lag 3 tidak lebih baik daripada model dengan Lag 2. Hal ini menunjukkan bahwa penambahan lag ke-3 tidak memberikan peningkatan kebaikan model yang signifikan dan justru mengurangi efisiensi model karena penalti akibat penambahan parameter.

5.2.3 Uji Kausalitas Granger

Uji kausalitas Granger adalah metode statistik yang mengidentifikasi hubungan sebab-akibat antara dua variabel deret waktu dengan menguji apakah nilai masa lalu dari satu variabel X dapat memprediksi nilai masa depan variabel lainnya Y secara lebih baik dibandingkan hanya menggunakan nilai masa lalu Y itu sendiri. Fungsinya untuk menentukan arah pengaruh antar variabel ekonomi atau keuangan, memberikan dasar untuk pemodelan akurat, membantu pemahaman mekanisme pasar atau kebijakan, serta mendukung pengambilan keputusan dengan mengidentifikasi variabel yang menjadi pendorong perubahan bagi variabel lainnya

Tabel 5.8 Hasil Uji Kausalitas Granger

	F-Statistik	Probabilitas
PE does not Granger Cause IPK	3.57877	0.0317
IPK does not Granger Cause PE	0.13571	0.8733

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil output yang terlihat di tabel 5.8, diperoleh model persamaan sebagai berikut:

$$PE_t = \sum_{i=1}^{m} \alpha_i \, PE_{t-\mathrm{i}} + \sum_{i=1}^{m} \beta_i \, IPK_{t-i} + \epsilon_{1t}$$

$$IPK_t = \sum_{i=1}^{m} \delta_i \, IPK_{t-i} + \sum_{i=1}^{m} \varphi_i \, PE_{t-i} + \epsilon_{2t}$$

Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan adanya hubungan kausalitas satu arah antara variabel Indeks Persepsi Korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan hasil pengujian dengan lag 2, H_0 bahwa "*PE does not Granger Cause IPK*" ditolak dengan nilai F-Statistik sebesar 3.57877 dan probabilitas 0.0317 (<0.05). Ini berarti variabel Indeks Persepsi Korupsi memiliki pengaruh kausalitas signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, H_0 bahwa "*IPK does not Granger Cause PE*" gagal ditolak dengan nilai F-Statistik sebesar 0.13571 dan probabilitas 0.8733 (>0.05), yang mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak menyebabkan perubahan pada Indeks Persepsi Korupsi dalam konteks kausalitas Granger. Temuan ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan kausalitas satu arah (*unidirectional causality*) dari Indeks Persepsi Korupsi menuju pertumbuhan ekonomi, yang artinya perubahan pada Indeks Persepsi Korupsi dapat menyebabkan perubahan pada partumbuhan ekonomi, tetapi tidak sebaliknya.

5.3 Pembahasan Hasil Penelitian

1. Pengaruh Indeks Persepsi Korupsi terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan hasil uji kausalitas Granger, ditemukan bukti signifikan bahwa Indeks Persepsi Korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dengan nilai F-statistik 3.57877 dan probabilitas 0.0317 (<0.05). Temuan ini sesuai dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen yang menekankan pentingnya faktor-faktor internal dalam mendorong kemajuan ekonomi jangka panjang (Lucas, 1988) dan (Romer, 1990). Menurut teori ini, kualitas institusi seperti rendahnya tingkat korupsi berperan penting dalam menciptakan lingkungan yang mendukung inovasi, investasi, dan pengembangan modal manusia (North, 1990). Secara moral, korupsi sangat tidak dibenarkan karena akan mengganggu jalannya reformasi pembangunan nasional yang ujungnya akan menghambat pertumbuhan (Al Hazmi, 2024). Ketika korupsi rendah, dana publik digunakan lebih efisien, investasi mengalir ke proyek-

proyek produktif, dan tingkat kepercayaan masyarakat serta investor meningkat. Korupsi yang rendah juga mendorong investasi dalam pendidikan, dan memastikan penempatan posisi untuk kerja didasarkan pada kemampuan, bukan koneksi atau suap. Dengan demikian, upaya untuk mengurangi korupsi tidak hanya penting dari segi moral, tetapi juga merupakan strategi ekonomi yang efektif untuk meningkatkan pertumbuhan jangka panjang (Aidt et al., 2008). Sesuai dengan prinsip-prinsip inti teori pertumbuhan endogen yang menekankan pentingnya faktor internal dan kualitas kelembagaan.

Temuan ini sejalan dengan temuan oleh (Almula-Dhanoon & Ahmed, 2012) yang meneliti tentang pengaruh korupsi, pertumbuhan ekonomi dalam ruang lingkup negara-negara keanggotaan BRIC dengan menggunakan metode regresi data panel menemukan hasil yang sama. Indeks Persepsi Korupsi memiliki dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemudian penelitian oleh (Lana & Khoirudin, 2022) yang meneliti hubungan kausalitas antara korupsi dan pembangunan berkelanjutan di kawasan Asia Tenggara dengan metode Uji Kausalitas Granger juga menemukan terdapat hubungan kausalitas antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi. Penelitian oleh (Mufidah et al., 2025) dengan menggunakan regresi data panel menemukan bahwa Indeks Persepsi Korupsi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi ASEAN secara signifikan.

2. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Persepsi Korupsi

Hasil uji kausalitas Granger menunjukkan tidak adanya pengaruh signifikan dari pertumbuhan ekonomi terhadap Indeks Persepsi Korupsi, dengan nilai F-statistik 0.13571 dan probabilitas 0.8733 (>0.05). Temuan ini kontras dengan anggapan “pertumbuhan mengurangi korupsi" oleh (Martin Paldam, 2002) yang menyatakan peningkatan pendapatan per kapita seharusnya mengurangi korupsi melalui mekanisme pembentukan institusional yang lebih baik. Hasil ini lebih mendukung pandangan bahwa kualitas institusi, termasuk tingkat korupsi merupakan faktor penentu pertumbuhan ekonomi daripada sebaliknya (Acemoglu & Verdier, 2000). Tidak ditemukannya hubungan kausal dari pertumbuhan ekonomi ke korupsi juga mengindikasikan bahwa peningkatan kesejahteraan ekonomi saja tidak cukup untuk mengurangi korupsi tanpa disertai reformasi institusional yang menyeluruh.

Temuan ini sejalan dengan temuan oleh (Triani, 2016) yang meneliti tentang hubungan antara korupsi, demokrasi, dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Menemukan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki hubungan kausalitas dengan variabel lainnya. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh (Yunan & Andini, 2018) yang meneliti tentang hubungan kausalitas antara korupsi, kemiskinan , dan pertumbuhan ekonomi dengan metode uji kausalitas Granger dan *Random Effect Model* di negara-negara ASEAN, menemukan di Indonesia dan Malaysia tidak terdapat hubungan kausalitas antar ketiga variabel. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan antara korupsi dan pertumbuhan ekonomi sangat rumit dan berbeda-beda di tiap daerah, sehingga upaya pemberantasan korupsi perlu dirancang khusus sesuai dengan kondisi dan kebutuhan institusional setiap negara.

5.4 Implikasi Kebijakan

1. Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi di ASEAN

Upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi menjadi strategi penting dalam pembangunan ekonomi berdasarkan hasil penelitian ini. Peningkatan Indeks Persepsi Korupsi dapat dilakukan melalui penguatan institusi-institusi anti-korupsi dan sistem pengawasan yang lebih efektif, seperti komisi anti-korupsi yang independen dan sistem peradilan yang transparan (Rose-Ackerman, S., & Palifka, 2016). Reformasi birokrasi yang menekankan transparansi, akuntabilitas, dan penyederhanaan prosedur administratif juga menjadi langkah yang baik untuk mengurangi peluang terjadinya korupsi. Kebijakan ini sejalan dengan pendekatan institusional dalam teori ekonomi kelembagaan yang menekankan pentingnya aturan formal maupun informal dalam mempengaruhi perilaku ekonomi (Oliver E. Williamson, 2000).

Selanjutnya, penerapan sistem meritokrasi penting untuk diimplementasikan agar mereka yang memiliki kompetensi serta berintegritas dihargai lebih layak atau diberi jabatan lebih bagus yang kemudian membuat seluruh tenaga kerja atau karyawan termotivasi menjadi lebih baik. Meritokrasi merupakan pilar krusial dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik atau biasa disebut dengan *good governance*. Dengan menempatkan kompetensi, integritas, serta prestasi kerja sebagai dasar utama dalam pengangkatan jabatan atau promosi, sistem merit ini akan menumbuhkan nilai-nilai keadilan, transparansi, dan

profesionalisme dalam birokrasi (Sulaiman et al., 2025). Untuk mewujudkan transparansi, pemerintah disarankan mengadopsi *e-government* dalam sistem pemerintahan. (Ripa Fajarina Laming, Anas Iswanto Anwar, Sri Rahmi, 2023) menganggap peningkatan akses informasi pemerintah melalui *e-government* mampu mengurangi risiko korupsi, karena adanya transparansi, keterbukaan, dan akuntabilitas pemerintah. Penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik akan mengurangi perilaku korup antara pegawai pemerintahan dan warga negara.

Keterlibatan masyarakat dan media juga berperan penting dalam upaya peningkatan Indeks Persepsi Korupsi. Pengawasan dari masyarakat dan liputan media yang kritis terhadap kasus-kasus korupsi menciptakan tekanan sosial bagi pejabat publik untuk bertindak jujur. Selain itu, pendidikan anti-korupsi dan kampanye kesadaran publik membantu membangun budaya integritas yang dapat mencegah praktik korupsi sejak dini. Berdasarkan pengalaman negara-negara yang berhasil meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi seperti Singapura dan Hong Kong, kombinasi antara reformasi institusional, penegakan hukum yang tegas, dan perubahan budaya masyarakat merupakan kunci keberhasilan dalam memberantas korupsi (Quah, 2017).

2. Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi di ASEAN

Strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi perlu memperhatikan kualitas institusi, terutama pada pengendalian korupsi sebagai prasyarat penting. Investasi dalam infrastruktur publik dan modal manusia harus disertai dengan mekanisme pengawasan yang ketat untuk memastikan efisiensi dan efektivitas penggunaan dana (Tanzi & Davoodi, 1998). Kebijakan yang mendorong persaingan sehat dan mengurangi monopoli juga dapat meminimalkan peluang aktivitas *rent-seeking* yang sering menjadi akar dari praktik korupsi. Dalam konteks ini, reformasi regulasi yang mengurangi hambatan birokrasi dan perizinan dapat menurunkan biaya transaksi ekonomi yang berpotensi memicu korupsi.

Penerapan teknologi dalam pelayanan publik, seperti *e-government* dan sistem pengadaan barang dan jasa elektronik, juga terbukti efektif dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas sektor publik (Andersen, 2006). Modernisasi administrasi perpajakan dan pengelolaan keuangan negara yang transparan mendorong kepatuhan wajib pajak dan meningkatkan penerimaan

negara tanpa menciptakan distorsi ekonomi. Pengalaman negara-negara seperti Estonia dan Korea Selatan menunjukkan bahwa digitalisasi layanan publik tidak hanya meningkatkan efisiensi tetapi juga secara signifikan mengurangi korupsi dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sebab, syarat utama yang dibutuhkan dalam pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan ialah dapat mengendalikan tata kelola pemerintahannya (Waluyo, 2010). Dengan demikian, strategi peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berfokus pada perbaikan tata kelola dan institusi akan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan pendekatan yang hanya menekankan pada peningkatan investasi fisik tanpa memperhatikan aspek kelembagaan. Dengan membangun institusi yang bersih dan responsif, negara-negara ASEAN dapat menciptakan fondasi pertumbuhan ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan dan berdaya saing (Menon & Melendez, 2017).